

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kerja sama internasional dewasa ini, menjadi salah satu unsur penting dalam hubungan luar negeri yang dijalin oleh suatu negara. Berkembangnya kerja sama internasional bermaksud untuk menyesuaikan kebijakan antar aktor untuk kemudian dinegosiasikan agar sesuai dengan preferensi masing-masing pihak, sehingga bersifat lebih kompatibel (www.globalpolicyjournal.com, n.d.). Pentingnya peran kerja sama internasional saat ini, mendorong banyak negara untuk saling menjalin kerja sama baik dalam tingkat bilateral maupun multilateral.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hubungan kerja sama regional yang cukup baik dengan beberapa negara anggota ASEAN. Misalnya saja, kerja sama Indonesia dalam BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area), serta IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) (www.adb.org, 2016). Kerja sama berbasis ekonomi yang dijalankan oleh Indonesia ini, dapat menjadi salah satu langkah kemajuan bagi ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan investasi asing serta pasar bebas yang menguntungkan.

IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle)¹ merupakan salah satu kerjasama sub-regional yang dibentuk sejak 1993 yang dijalin oleh Aceh dengan

¹ Merupakan kerjasama sub regional yang dibentuk untuk meningkatkan perekonomian, infrastruktur dan memfasilitasi pembangunan sub regional yang ditujukan kepada negara bagian dan provinsi dari

negara bagian dan provinsi lain di Malaysia dan Thailand. Kerjasama sub-regional ini dibangun untuk memfasilitasi dan mempromosikan perdagangan serta investasi terhadap wilayah sasaran negara anggota. Bagian tersebut termasuk dalam bidang *trade and investment, agriculture and agroindustry, transport linkages, human resource development, labor mobility dan halal products and services* (IMT GT, 2007). Beberapa isu tersebut merupakan bagian dari *action plan* IMT-GT yang akan dilaksanakan selama periode 2007-2011 dan dilanjutkan pada 2012-2016 demi merealisasikan tujuan dari dibentuknya kerjasama tersebut.

Kerjasama Indonesia dan pemerintah daerah bersama IMT-GT sekaligus dibentuk guna mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup melalui sub-regional yang damai dan sejahtera (acehinvestment.com, 2013). Tujuan ini sesuai dengan salah satu program kerja IMT-GT, yakni HRD (*Human Resources Development*) dengan beberapa program terkait pengembangan daya saing tenaga kerja serta perbaikan mobilitas tenaga kerja (IMT-GT, 2012). Kerjasama ini juga dibentuk untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Aceh demi meminimalisir kemungkinan tindak kejahatan yang dapat terjadi akibat kemiskinan masyarakat Aceh.

Keberadaan salah satu program IMT-GT yakni HRD, dapat menjadi kesempatan bagi Aceh untuk dapat meningkatkan perekonomian serta

ketiga negara tersebut. Yakni 10 provinsi di pulau Sumatera Indonesia (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat Bengkulu, Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan), Malaysia (Kedah, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Penang, Perak, Perlis dan Selangor) serta Thailand (Krabi, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Hattalung, Satun, Songkhla, Trang, Yala, Chumphon, Ranong, Surat Thani, Phang Nga, Phuket).

mengembangkan sumber daya manusianya. Program HRD yang ditekankan di Indonesia sendiri, fokus pada pendidikan, pelatihan dan pengembangan karir, yang mana ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi daya saing dan kompetisi nasional (IMT-GT WGHRD, 2007).

Pentingnya program HRD di Aceh, ironisnya tidak diiringi dengan implementasi program kerja yang nyata dan sistematis. Berdasarkan laporan dari *International Labour Organization* dan *Asian Development Bank*, IMT-GT hanya menunjukkan sedikit kemajuan dalam perekonomian di wilayah-wilayah negara anggota. Selain itu, Provinsi dan negara bagian dari negara anggota hanya mencapai perubahan pada titik nol atau dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Di sisi lain, beberapa proyek yang telah direncanakan nyatanya harus tertunda karena permasalahan hambatan teknis, finansial dan hukum (ILO dan ADB, 2014: 27).

Implementasi program HRD juga dianggap tidak efektif² pada beberapa aspek. Salah satunya adalah terkesan adanya tumpang tindih antara program yang dibicarakan pada JBC (*Joint Business Council*)³ dan *Agreed Minutes*⁴ sebagai pertemuan yang dilaksanakan untuk membahas rancangan program. Sebagai contoh, pada pertemuan JBC yang dilaksanakan pada bulan Juli 2008, inisiasi proyek baru diantaranya IMT-GT Youth Camp, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) serta *Joint International Conference on HRD* (IMT-GT JBC, 2008: 2-3). Namun, belum

² Penelitian ini menggunakan kata inefektivitas dan tidak efektif secara bergantian.

³ JBC merupakan pihak yang berfungsi sebagai *private sector* yang bekerja sama dengan pemerintah negara bagian atau Provinsi negara anggota (www.imtgt.org).

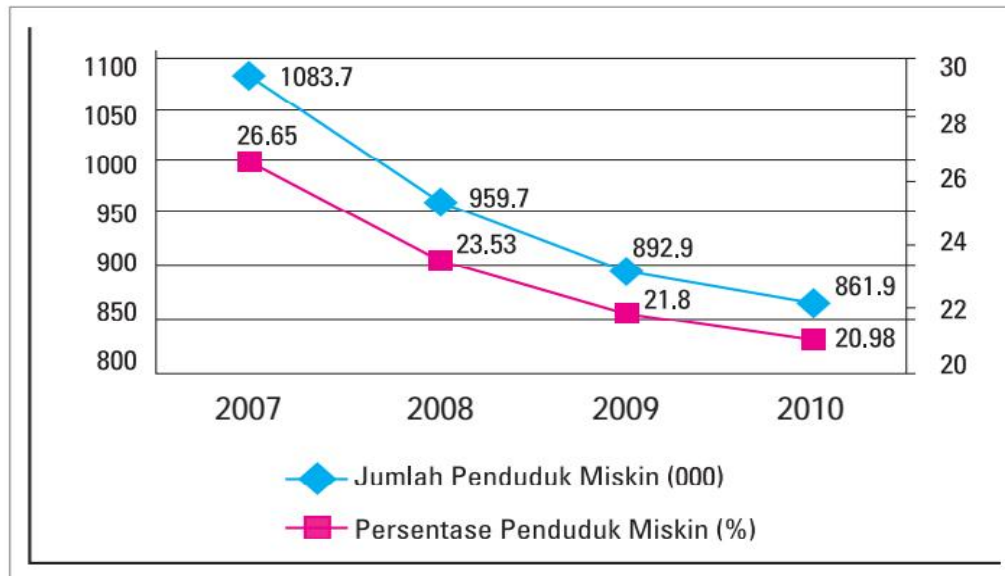
⁴ Merupakan rapat yang dilakukan oleh *national secretariat* IMT-GT dan bekerja sama dengan CIMT, JBC dan anggota IMT-GT lainnya (www.imtgt.org).

sempat inisiatif proyek baru ini berjalan, masih pada tahun yang sama, pada *Agreed Minutes* yang dilakukan September di Banda Aceh justru telah membicarakan proyek baru yakni tentang harmonisasi kompetensi standar yang ingin dilakukan di Indonesia pada 2009 mendatang serta ditambah dengan tiga belas proposal proyek baru dari Thailand (WGHRD, 2008: 3-5).

Padahal, dalam situs resminya, IMT-GT menekankan bahwa harus ada kesesuaian dan saling berhubungan antara satu agen dengan agen lainnya dalam menciptakan sebuah program yang berkelanjutan (www.imtgt.org, 2009). Selain itu, rentang waktu cukup lama berdirinya IMT-GT yakni sejak tahun 1993 hingga kini, belum memberikan banyak perubahan yang berarti. Bahkan kerja sama ini baru mulai aktif kembali pada tahun 2007, setelah sebelumnya vakum cukup lama. Hal ini sangat disayangkan jika dibandingkan dengan kerja sama sub-regional ASEAN lainnya seperti IMS (Indonesia-Malaysia-Singapore) dan GMS (Great Mekong Subregion) yang sukses dalam naungan kerja sama segitiga pertumbuhan (RSIS, 2009: 9).

Sebagai sebuah kerja sama sub-regional yang berdekatan secara geografis, harusnya IMT-GT dapat membantu untuk pengembangan wilayah sasaran negara anggota. Di sisi lain, jika berlandaskan pada tujuan berdirinya IMT-GT maka program HRD hendaknya dapat memberikan kontribusi untuk dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Aceh. Kenyataannya, belum ada perbaikan yang berarti terhadap jumlah kemiskinan di Aceh selama berdirinya kerja sama ini. Jumlah kemiskinan masyarakat Aceh secara umum dapat dijelaskan melalui tabel persentase kemiskinan penduduk miskin di Aceh, pada 2007 hingga 2011 berikut:

Grafik 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Aceh Tahun 2007-2010



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh.

Melalui grafik di atas, terdapat penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di Aceh sejak 2007 hingga 2010. Yakni, 26.65% pada tahun 2007, 23.53% pada tahun 2008, 21.8% pada tahun 2009 dan 20,98 pada tahun 2010.

Penurunan jumlah kemiskinan di Aceh pada 2007-2010 tidak serta merta dapat dikatakan berhasil. Karena pada kenyataannya, tingkat kemiskinan di Aceh masih jauh di atas angka rata-rata nasional yang kurang dari 20% sehingga membuat Aceh harus lebih bekerja keras demi pengentasan kemiskinan yang ada (Bappeda, n.d.: 3-4). Di samping itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh atau Bappeda (Bappeda, n.d.: 19-20) juga menyatakan bahwa salah satu faktor penyebab

kemiskinan di Aceh adalah sebaran penduduk miskin lebih banyak di perdesaan dibandingkan di perkotaan sehingga menciptakan gap ekonomi antar wilayah.

Tingginya faktor kemiskinan di Aceh bukan tidak mungkin dapat menjadi celah munculnya kejahatan dan tindakan kriminalisasi. Menurut Sugiarti (2014, 3-4), penyebab timbulnya kejahatan bisa disebabkan karena faktor ekonomi seperti pengangguran atau putus sekolah. Juga bisa disebabkan karena tuntutan agar dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga, kemiskinan sangat berperan penting dan berkaitan terhadap timbulnya suatu tindak kejahatan (Sugiarti, 2014: 3-4).

Program HRD melalui kerja sama IMT-GT dapat memberikan harapan bagi Aceh untuk dapat meningkatkan sumber daya manusia serta perekonomian Aceh. Ironisnya, program pengentasan kemiskinan di Aceh masih belum mampu berjalan secara efektif dalam menangani kemiskinan di Aceh. Padahal, kemiskinan dan sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting untuk mengembangkan sebuah wilayah. Sehingga, berdasarkan keterangan di atas, penelitian ini penting untuk diteliti dalam rangka untuk mengetahui penyebab hambatan program HRD dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Program *Human Resources Development* IMT-GT tidak efektif mengurangi kemiskinan di Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yakni:

- a. Memberikan gambaran mengenai program HRD di Aceh;
- b. Memberikan gambaran mengenai permasalahan kemiskinan di Aceh;
- c. Menjelaskan penyebab hambatan program HRD dan dampak yang dapat ditimbulkan akibat kemiskinan di Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat baik secara akademis maupun praktis, yakni:

1. Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan secara akademis bagi seluruhelemen penstudi Hubungan Internasional dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan studi Hubungan Internasional;
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait penjelasan mengenai tidak berhasilnya program HRD dalam mengurangi kemiskinan di Aceh;
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab hipotesa yang ada dengan membuktikan kelebihan pendekatan neo-fungsionalisme dalam menjelaskan studi kasus keberhasilan program HRD dalam mengurangi kemiskinan di Aceh.

2. Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya kerja sama IMT-GT untuk mengurangi kemiskinan di Aceh;
- b. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian dan kesiagaan pemerintah Indonesia terhadap dampak dan pengaruh dari kerja sama dan investasi asing ke Indonesia;
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kerjasama IMT-GT serta program HRD di Indonesia dan Aceh secara khusus.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Neo-Fungsionalisme

Neo-fungsionalisme merupakan pemikiran yang digagas oleh Ernst B. Haas pada 1975. Secara umum, teori ini dikenal melekat dengan perkembangan integrasi Uni Eropa pada masanya. Namun, teori ini terus berkembang seiring zaman yang digunakan sebagai pisau analisis dalam memahami integrasi di regional lainnya, seperti Amerika Latin, Asia Tenggara maupun Asia Pasifik.

Pendekatan ini dinilai penting karena mampu untuk mempelajari lebih dalam tentang integrasi internasional, terutama regionalisme yang berkembang saat ini. Sehingga menjadi salah satu teori kontemporer untuk memahami permasalahan diluar isu-isu tradisional (Riedel, 2008: 88). Pengertian integrasi regional menurut

Schneider adalah suatu proses menciptakan perubahan terhadap heterogenitas yang relatif dan kurangnya kerja sama menjadi sebuah peningkatan kerja sama, integrasi, kovergensi, koherensi dan identitas dalam berbagai bidang. Seperti; budaya, keamanan dan pembangunan ekonomi politik dalam wilayah geografis tertentu (Schneider, n.d.: 2).

Fredrik Soderbaum sebagai salah satu pendukung gagasan pendekatan regionalisme baru menambahkan, regionalisasi merupakan proses kerja sama dan integrasi yang menciptakan ruang kawasan dan hasil. Hal ini berarti, pemusatan aktivitas pada tingkat regional untuk meningkatkan proses pembentukan kawasan, jaringan dan aktor regional atau organisasi regional (Soderbaum, 2008: 119-120).

Teori neo-fungsionalisme ini pada dasarnya berdiri untuk menjawab pertanyaan bagaimana agar integrasi regional dapat berjalan dengan baik dan beriringan dengan faktor ekonomi dan politik yang ada. Bagaimana integrasi ekonomi dapat menciptakan tekanan bagi dimensi politik maupun sebaliknya (Riedel, 2008: 89). Teori ini percaya bahwa interdependensi ekonomi antar negara anggota yang diciptakan dapat menjadi hal penting dalam rangka membangun integrasi regional, atau dalam keadaan ini neo-fungsionalisme diidentikkan dengan istilah *spillover* (Campos, 2016: 859-860).

Menurut Lindberg (1963) dalam tulisan Malamud, *spillover* dapat dipahami sebagai metafora utama dari teori neo-fungsionalis dimana merupakan suatu proses untuk mengambil tindakan tertentu terkait dengan tujuan tertentu, untuk menciptakan situasi dimana tujuan utama hanya akan dapat tercapai jika ada tindakan lebih lanjut

untuk mengiringi tujuan awal (Malamud, 2001: 3). Atau secara sederhana diperlukan tindakan lebih lanjut untuk menyempurnakan tindakan-tindakan sebelumnya, dalam organisasi regional dapat dipahami sebagai program, rancangan atau pembaharuan dari organisasi tersebut.

Lebih lanjut Malamud menjelaskan bahwa, saat ini *spillover* dapat dipahami sebagai fungsi dari beberapa faktor yang ada, diantaranya; perluasan masyarakat transnasional, struktur kelembagaan dari regional maupun negara-negara anggotanya serta skema ketergantungan dan saling tawar-menawar (Malamud, 2001: 7). Secara lebih rinci, *spillover* juga menekankan pada adanya hubungan antara ekonomi dan politik. Ketergantungan akan ekonomi tidak dapat berjalan sendiri sehingga tetap perlu adanya dorongan atau penyokong dari elit politik sebagai pemilik kekuasaan. Hal ini juga menjadi premis dasar dari teori neo-fungsionalisme (Malamud, 2001: 15-19).

Spillover juga dapat dipahami sebagai usaha untuk menjawab pertanyaan dari teori neo-fungsionalisme, yakni, bagaimana menciptakan integrasi yang baik melalui faktor ekonomi yang sekaligus juga dapat memimpin faktor politik. *Spillover* itu sendiri dapat menjadi skema untuk menciptakan integrasi dengan menciptakan berbagai tujuan kolektif untuk melengkapi tujuan lainnya (Riedel, 2008: 88-89).

Menurut Haas dalam tulisan Stone Sweet, integrasi merupakan hasil dari interaksi transaksi beserta organ pemerintahan dan elit politik. Untuk menciptakan sebuah integrasi, para elit harus memahami betul permasalahan tertentu yang dapat diselesaikan melalui sebuah institusi regional (Sweet, 2012: 6-7). Penjelasan ini dapat

digambarkan dengan tiga elemen penting dalam neo-fungsionalisme. Pertama, adanya aktor dan kelompok dengan tujuan dan kepentingan transnasional (masyarakat transnasional). Kedua, organisasi memiliki kapasitas otonomi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan membuat dasar hukum. Ketiga, adanya peraturan atau struktur normatif yang mendefinisikan atau menjadi dasar dari negara anggota (Sweet, 2012: 7-8). Haas menambahkan satu elemen lainnya yaitu ekspansi melalui transaksi lintas batas yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat melalui pemerintahan supranasional (Sweet, 2012: 11).

W. S. Jones dalam tulisan Martin dan Pramono menambahkan (2011), Integrasi bukan merupakan suatu hal yang terjadi dengan sendirinya, melainkan karena adanya dorongan dan proses yang disengaja dari negara-negara anggota. Proses integrasi ini dipahami sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai seperti maksimalisasi potensi ekonomi, politik maupun penyelesaian masalah regional (Martin dan Pramono, 2011: 30). Sehingga, keterikatan anggota terhadap perjanjian yang ada serta efektifitas institusi tersebut dalam membentuk peraturan atau kebijakan dapat menjadi faktor untuk menilai baiknya integritas suatu regionalisme (Martin dan Pramono, 2011: 29-30).

Pentingnya sebuah integrasi pada regionalisme harus dapat dijelaskan melalui beberapa faktor atau indikator yang membangun. Berikut tabel yang menjelaskan beberapa ciri agar dapat lebih mudah memahami teori neo-fungsionalisme:

Tabel 1.1
Tabel Ciri dari Integrasi Regional Menurut Teori Neo-fungsionalisme

Faktor Penentu	Indikator
Aktor utama	Negara, proses tawar-menawar dalam lingkup supranasional, elit dalam bidang ekonomi di tingkat nasional dan regional
Mekanisme pusat	<i>Spillover</i>
Wilayah kekuasaan	Regional
Peranan dalam institusi	Independen dan dependensi (adanya timbal balik)

Sumber: Tabel diolah peneliti berdasarkan tulisan dari Andres Malamud (2001: 6).

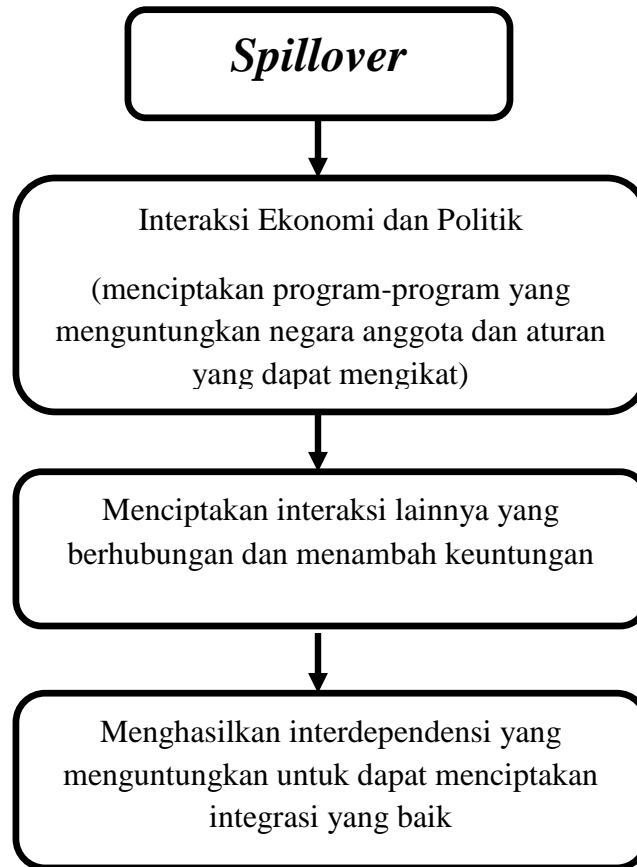
Melalui tabel di atas dapat dipahami bahwa indikator-indikator yang dijelaskan dalam teori neo-fungsionalisme merupakan faktor untuk menciptakan terealisasinya integrasi yang baik dalam sebuah regionalisme. Secara umum, keseluruhan indikator menekankan pada arus timbal balik antar negara anggota maupun dengan organisasi regional tersebut. Hal ini telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya mengenai *spillover* dan interdependensi dalam neo-fungsionalisme.

Demi menciptakan sebuah integrasi regional yang baik, indikator yang dijelaskan oleh teori neo-fungsionalisme dapat menjadi unsur pendukung dalam pengembangan dan penciptaan mekanisme integrasi yang saling menguntungkan. Pada permasalahan IMT-GT, teori neo-fungsionalisme mampu menjadi penjembutan untuk menilai dan memprediksi penyebab kerja sama sub-regional yang telah berdiri cukup lama lemah dalam menjalankan institusi beserta program-program yang dimilikinya. Lebih rinci, peneliti menekankan pada tidak efektifnya program HRD

dalam mengurangi kemiskinan yang ada di Aceh sebagai salah satu program dari IMT-GT.

Melalui teori neo-fungsionalisme, dalam sebuah kerja sama yang berlandaskan pada sebuah regionalisme perlu adanya sebuah institusi yang jelas dan terarah bersama dengan aturan dan traktat yang dimiliki untuk menyelesaikan permasalahan antar negara anggota. Timbal balik dan ketergantungan antara negara anggota juga menjadi poin utama yang perlu ditekankan dalam teori ini, skema berikut menggambarkan tentang pentingnya pengaruh *spillover* dalam sebuah kerja sama regional:

Gambar 1.1
Skema Penjelasan Pengaruh *Spillover* dalam Menciptakan Integrasi Regional yang Baik



Sumber: Gambar diolah oleh peneliti berdasarkan penjelasan sebelumnya

Melalui skema di atas dapat dipahami bahwa, *spillover* merupakan kunci utama untuk menciptakan sebuah integrasi ekonomi dan regional yang baik. Intensitas interaksi yang semakin tinggi dapat menciptakan interdependensi yang menguntungkan, baik bagi negara anggota maupun institusi itu sendiri. Sehingga, sebagai sebuah regionalisme yang berbasis pada kerja sama berbasis ekonomi, IMT-GT harusnya

mampu menjadi sebuah regionalisme yang sukses jika berkaca pada analisis keberhasilan organisasi-organisasi regionalisme lainnya yang menganut neo-fungsionalisme.

Keberadaan teori neo-fungsionalisme dapat menjadi sebuah pen jembatan untuk menjelaskan penyebab inefektivitas IMT-GT sebagai sebuah kerja sama regional yang terdiri dari negara-negara yang memiliki perekonomian yang baik dan letak yang strategis nyatanya tidak efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sehingga, fungsi dari teori ini juga hendaknya dapat memberikan jawaban dan saran atau bagaimana harusnya sebuah integrasi regional dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.

1.6 Hipotesis

Melalui pemahaman dari latar belakang dan teori yang digunakan, dapat ditemukan hipotesa bahwa penyebab hambatan program HRD IMT-GT dalam mengurangi kemiskinan di Aceh disebabkan tidak berhasilnya IMT-GT dalam menciptakan sebuah integritas regional yang baik sebagai sebuah kerja sama sub-regional. Sehingga, hal ini berdampak pada kualitas dari program-program yang dihasilkan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan

induktif (Rahmat, 2009: 1). Penelitian ini diharapkan mampu memahami data penelitian yang disajikan secara deskriptif. Sehingga mampu menghasilkan uraian penelitian yang jelas dan dapat dipahami.

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Efektivitas

Menurut Raustiala (2000: 393-394), efektivitas adalah sejauh mana aturan tertentu mampu memberikan pengaruh untuk mencapai terhadap tujuan dasar yang ingin dicapai. Atau secara sederhana, efektivitas dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan “memecahkan masalah-masalah utama” yang menyebabkan adanya faktor-faktor tertentu untuk dapat memberikan pengaruh dalam penyelesaian masalah (Raustiala, 2000: 393-394). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan atau keberhasilan yang ingin dicapai untuk sebuah tujuan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu.

1.7.1.2 Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak tersedianya aset yang dibutuhkan (Busra, n.d.: 4). Kemiskinan itu sendiri menurut Winardi dalam tulisan Busra, terbagi atas dua dimensi yakni kemiskinan pendapatan dan non pendapatan. Kemiskinan dalam dimensi pendapatan adalah kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima, sedangkan kemiskinan dalam dimensi non pendapatan

dicirikan dengan ketidakmampuan, ketidakterwakilan dan ketidakbebasan (Busra, n.d.: 4-5). Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemiskinan tidak hanya permasalahan ekonomi, melainkan kekurangan atau ketidakmampuan seseorang atas sesuatu dapat dikategorikan sebagai sebuah kemiskinan.

1.7.1.3 Integrasi Regional

Carleton University menjelaskan bahwa integrasi regional adalah proses dimana dua atau lebih negara setuju untuk bekerja sama untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran dengan melalui perjanjian tertulis (Carleton.ca, 2017). Lebih rinci, Iinuma dalam tulisannya menyatakan bahwa region merupakan sebuah kumpulan yang terdiri dari negara-negara yang berdekatan secara geografis dan batas-batas negara anggota, serta secara tidak langsung memiliki ketergantungan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Sehingga, Iinuma menggambarkan bahwa integrasi regionalisme merupakan sebuah kerja sama yang dibangun dengan kesepakatan dan adanya saling rasa ketergantungan dan keterkaitan (Iinuma, 2014: 3-4). Melalui definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa integrasi regional merupakan sebuah kerja sama yang dijalin oleh dua negara atau lebih dalam persamaan-persamaan tertentu untuk mencapai tujuan bersama.

1.7.1.4 Spillover

Spillover merupakan salah satu skema yang diperkenalkan oleh teori neofungsionalisme untuk menjelaskan penciptaan integrasi regional yang baik. Riedel

(2008: 88) menjelaskan bahwa *spillover* berfungsi sebagai pen jembatan kesuksesan antara satu sektor dengan sektor lainnya serta menciptakan interdependensi positif antar anggota. Sehingga, menghasilkan integrasi regional yang baik. perluasan kerja sama itu sendiri juga dapat menjadi skema untuk menciptakan integrasi demi melengkapi suatu tujuan dengan menciptakan tujuan lainnya (Riedel, 2008: 88).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Efektivitas

Pada penelitian ini, definisi dari efektivitas menjadi landasan untuk menjelaskan tidak efektifnya kerja sama IMT-GT dan program HRD karena ketidakmampuan IMT-GT memberikan pengaruh dalam hal integrasi regional dan interaksi antar negara anggota. Hal ini dilakukan demi mencapai tujuan-tujuan yang ingin dicapai, yakni mengurangi kemiskinan dan mengembangkan sumber daya manusia di wilayah sasaran negara anggota melalui program HRD. Selain itu, program HRD juga dinilai tidak mampu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah prioritas, dalam hal ini kemiskinan di Aceh beserta pengembangan sumber daya manusianya.

1.7.2.2 Kemiskinan

Kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini hanya dikhususkan pada masyarakat Aceh. Penelitian ini melihat kemiskinan tidak hanya pada sudut pandang ekonomi melainkan juga keterbatasan-keterbatasan lain yang tidak mampu dicapai

oleh masyarakat sehingga mereka terbelakang atas akses tertentu, seperti pendidikan dan keterampilan. Lebih lanjut, kemiskinan dalam penelitian ini juga dijelaskan dengan potensi kejahatan yang dapat ditimbulkan karena posisi mereka sebagai pihak yang terasingkan disebabkan atas kemiskinan atau kekurangannya tersebut.

1.7.2.3 Integrasi Regional

Penelitian ini memfokuskan integrasi regional sebagai sebuah penjelasan tentang definisi dari regionalisme yang digambarkan dengan kerja sama IMT-GT berlandaskan pada kedekatan geografis. Sedangkan integrasi regional secara khusus menjelaskan tentang bagaimana harusnya sebuah kerja sama regionalisme berjalan dengan baik melalui persamaan-persamaan yang ada dan sikap saling ketergantungan baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial antara satu negara dengan yang lainnya. Penelitian ini melihat bagaimana IMT-GT mampu untuk menjalankan sebuah integrasi regional yang baik untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang ingin dicapai, khususnya melalui program HRD.

1.7.2.4 Spillover

Spillover dalam penelitian ini menjelaskan tentang kinerja dari program HRD IMT-GT dalam memperluas kerja sama dan inisiasi proyek yang di usung demi menjalankan fungsi dan tujuan berdirinya HRD IMT-GT itu sendiri. Penelitian ini melihat sebab dan akibat dari penggunaan skema *spillover*, yakni membuktikan

kesuksesan sebuah kerja sama regional beserta programnya dalam menjalankan skema *spillover*.

1.7.3 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah eksplanatif. Penelitian eksplanatif atau eksplanatori merupakan penelitian untuk mencari jawaban dari jenis pertanyaan mengapa dan bagaimana, serta mencoba untuk “menghubungkan titik-titik” dalam penelitian dengan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan hasil dari sasaran penelitian (Bhattacharjee, 2012: 6).

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian yang diangkat adalah mengenai hambatan program HRD IMT-GT dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Agar lebih terfokus, penelitian ini juga membatasi waktu penelitian yakni pada tahun 2007-2016, dimana tahun tersebut merupakan jangka waktu program kerja selama dua periode yang ingin dan telah dijalankan oleh IMT-GT. Meski begitu, penulis tetap membutuhkan data dan informasi di luar waktu tersebut, baik sesudah maupun sebelumnya, demi memperkuat analisis penelitian ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, jurnal, laporan, media masa dan lain sebagainya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai data primer penelitian. Yakni; Ibu Puty Retnowulan sebagai Kasubbag Kerja sama Non-ASEAN, Bapak Sofwan Setiawan sebaga Kabag Kerja Sama Regional, Bapak Muzailin Affan Ketua Sekretariat *University Network* Banda Aceh, Ibu Ratna Keumala Koordinator Bidang HRD IMT-GT Provinsi Aceh. Selain itu, data primer juga didapatkan dari sumber-sumber resmi IMT-GT. Yakni; hasil rapat dan *Implementation Blueprint* IMT-GT.

Sementara itu, untuk pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, dengan pengumpulan dan analisa berdasarkan data-data dari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Literatur dapat berupa buku, jurnal, laporan, media masa dan lain sebagainya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk memperlihatkan interaksi manusia dan peristiwa dengan faktor-faktor sebab-akibat lainnya di dalam

konteks, sehingga membatasi probabilitas dan alternatif dari sebab-akibat (House, 2011: 469).

Melalui tulisannya, House juga menjelaskan bahwa pada awalnya konsepsi tentang hubungan sebab-akibat cenderung lebih teratur karena dinilai pasti memiliki hubungan peristiwa yang terjadi saat ini dengan peristiwa yang ada sebelumnya dan terjadi secara berulang. Namun, hubungan sebab-akibat kini dipahami lebih kompleks karena adanya hubungan antara variabel sebelumnya, sesudahnya maupun saat terjadi hingga pada akhirnya mendapatkan hasil atau jawaban dari penelitian (House, 2011: 468-469).

Melalui pemahaman penelitian kualitatif di atas, penelitian diharapkan mampu memahami data penelitian yang disajikan secara deskriptif dengan menjelaskan sebab-akibat dari permasalahan yang diteliti. Sehingga mampu menghasilkan uraian penelitian yang jelas dan dapat dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menganalisis hambatan program HRD IMT-GT dalam mengurangi kemiskinan di Aceh dengan menggunakan teori integrasi regional untuk menjelaskan efektifitas kerja sama dari IMT-GT.

1.8 Sistematika Penulisan

Bab I: Berisi pendahuluan yang memberikan paparan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penulisan;

Bab II: Berisi uraian yang menggambarkan inefektivitas program HRD IMT-GT dan fenomena kemiskinan yang ada di Aceh;

Bab III: Berisi uraian yang menjelaskan tentang penyebab kegagalan IMT-GT dalam implementasi program HRD di Aceh;

Bab IV: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.